

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BATAM**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



OLEH:

MUHAMMAD ANDRI ADINATA

1910841037

Dibimbing Oleh:

Dr. Roni Ekha Putera, S.IP, M.PA

Kusdarini, S.IP, M.PA.

DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

ABSTRAK

Muhammad Andri Adinata, NIM 1910841037, Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang 2023. Dibimbing Oleh Dr. Roni Ekha Putera, S.IP, M.PA dan Kusdarini, S.IP, M.PA. Skripsi ini terdiri dari 164 halaman dengan referensi menggunakan 6 buku teori, 5 buku metode, 2 Skripsi, 4 Jurnal, 6 Website, 4 Peraturan, dan 6 Dokumen.

Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan bagaimana proses implementasi kebijakan SPBE di Kota Batam yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terpadu dengan dilatarbelakangi oleh pengintegrasian pada layanan yang terdapat dalam SPBE. Kota Batam merupakan satu-satunya Kota di Provinsi Kepulauan Riau dengan indeks SPBE yang berkategori baik dari 5 Kabupaten dan Kota yang terdapat di Provinsi tersebut. Namun, dalam pelaksanaan kebijakan SPBE ditemui permasalahan salah satunya terkait minimnya koordinasi antar penyelenggara SPBE. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian antara predikat yang diraih dengan apa yang dilaksanakan. Mengingat, bahwa tingkat kematangan SPBE pemerintah Kota Batam merupakan yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau.

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan teknik pemilihan informan yaitu *purposive sampling*. Sedangkan teknik keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Ripley dan Franklin yang terdiri dari 2 variabel yaitu *Compliance*(Kepatuhan) dan *What's Happening and Why*(Apa yang terjadi dan kenapa)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SPBE di Kota Batam belum terimplementasi dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh (1) minimnya pemahaman implementor terhadap kebijakan, kegiatan koordinasi yang tidak terencana antar implementor, tidak adanya sosialisasi terhadap pedoman kebijakan. (2) faktor diluar kendali yang mempengaruhi proses implementasi yaitu faktor instansi kurangnya kesadaran akan keberadaan pedoman kebijakan. (3) faktor infrastruktur yang kurang memadai, dan faktor perkembangan teknologi yang sangat pesat. Dengan demikian, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam sebagai aktor utama perlu membenahi permasalahan-permasalahan tersebut agar implementasi kebijakan SPBE dapat berjalan dengan efektif.

Kata Kunci : Implementasi, E-Government, Integrasi, SPBE

ABSTRACT

Muhammad Andri Adinata, NIM 1910841037, Implementation of Electronic-Based Government System Implementation Policy within the Batam City Government, Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Padang 2023. Supervised by Dr. Roni Ekha Putera, S.IP, M.PA and Kusdarini, S.IP, M.PA. This thesis consists of 164 pages with references using 6 theory books, 5 method books, 2 theses, 4 journals, 6 websites, 4 regulations, and 6 documents.

This research intends to describe the process of implementing the SPBE policy in Batam City which aims to realize integrated governance based on the integration of services contained in the SPBE. Batam City is the only city in the Riau Islands Province with a good SPBE index out of the 5 regencies and cities in the province. However, in implementing the SPBE policy, problems were encountered, one of which was related to the lack of coordination between SPBE organizers. This creates a discrepancy between the predicate achieved and what is implemented. Bearing in mind that the SPBE maturity level of the Batam City government is the highest in the Riau Islands Province.

This research uses a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out by interviews, observation and documentation with the informant selection technique, namely purposive sampling. Meanwhile, the data validity technique uses source triangulation. This research uses the theory of policy implementation proposed by Ripley and Franklin which consists of 2 variables, namely Compliance and What's Happening and Why (What happened and why?)

The results of this research indicate that the implementation of the SPBE policy in Batam City has not been implemented optimally. This is caused by (1) minimal understanding of the policy by implementors, unplanned coordination activities between implementors, and no socialization of policy guidelines. (2) factors beyond control that influence the implementation process, namely the agency's lack of awareness of the existence of policy guidelines. (3) inadequate infrastructure factors, and very rapid technological development factors. Thus, the Batam City Communication and Information Department as the main actor needs to fix these problems so that the implementation of the SPBE policy can run effectively.

Keywords: Implementation, E-Government, Integration, SPBE